

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Tembakau merupakan salah satu dari sekian banyak komoditas perkebunan yang dihasilkan oleh produksi sektor pertanian di Indonesia. Berdasarkan hasil pencatatan oleh Kementerian Pertanian RI (2023) total produksi tembakau mencapai angka 238,806 ton dengan 199,371 hektar luas lahan yang digunakan untuk menanam tembakau di Indonesia. Besarnya angka produktivitas tembakau yang dihasilkan, tak ayal jika Indonesia termasuk ke dalam jajaran negara produsen tembakau di dunia. Di dalam keberadaannya, selama ini tembakau menjadi salah satu komoditas perkebunan yang memiliki nilai strategis baik dalam segi ekonomi dan sosial. Dilansir dari data Kementerian Keuangan RI (2022), Realisasi penerimaan cukai hasil tembakau mencapai angka sebesar 219,62 triliun rupiah sepanjang tahun 2022. Pada tahun yang sama, nilai ekspor tembakau Indonesia mencapai angka sebesar 1,488,7 juta dollar AS (Kemendag, 2022). Dari data-data tersebut, menunjukkan bahwa tembakau menjadi komoditas yang memberikan kontribusi yang signifikan bagi pemasukan kas negara. Tak hanya berkontribusi bagi pendapatan negara, eksistensi tembakau juga menjelma sebagai salah satu sarana penyerapan tenaga kerja bagi jutaan pekerja dan petani yang terdapat dari sektor hulu hingga hilir industri hasil tembakau. Berdasarkan data Kementerian Perindustrian (2019) tembakau setidaknya menjadi sumber bagi penghidupan utama bagi lebih dari 5,98 juta orang yang terlibat dalam rantai industri hasil tembakau. Dengan demikian, tingginya nilai ekonomi dan sosial yang dihasilkan menjadikan tembakau sebagai komoditas yang memberikan kontribusi besar baik bagi pendapatan petani dan pekerja, serta pertumbuhan perekonomian negara.

Kabupaten Temanggung merupakan salah satu sentra penghasil tembakau di Indonesia. Sebagaimana yang diketahui, Temanggung adalah daerah yang sebagian besar wilayahnya berada di dataran tinggi. Hal ini dikarenakan wilayah Temanggung dinaungi oleh dua gunung kembar legendaris di Jawa bagian Tengah, yaitu Gunung Sumbing (3.260 mdpl) dan Gunung Sindoro (3.115 mdpl) serta

beberapa gunung yang berukuran kecil seperti Gunung Pakuwaja dan Gunung Prau (Brata, 2012). Dengan berada di dataran tinggi menjadikan daerah ini tergolong sebagai wilayah yang subur dan suhu yang relatif sejuk. Oleh karena itu, Menurut Mubyarto (dalam Farizal & Atmaja, 2023) adanya unsur hara yang merupakan hasil peristiwa vulkanisme yang menyuburkan tanah dan didukung dengan iklim yang sejuk ($20,5^{\circ}\text{C} - 23,6^{\circ}\text{C}$) menjadikan Kabupaten Temanggung sebagai daerah yang sangat cocok untuk budidaya tembakau. Selama ini, produktivitas tembakau yang dihasilkan di Temanggung menjadi salah satu yang tertinggi di Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan data yang diperoleh dari BPS Provinsi Jawa Tengah (2024) Temanggung merupakan salah satu daerah dengan produktivitas tembakau yang menghasilkan 10.022 ton. Angka ini tergolong tinggi jika dibandingkan dengan daerah lain yang menjadi produsen tembakau di Jawa Tengah seperti Boyolali (4.457 ton), Grobogan (4.425 ton), dan Kendal (5.786 ton).

Tingginya jumlah produktivitas tembakau yang dihasilkan, menjadikan tembakau menjelma sebagai komoditas unggulan yang keberadaannya terus dipertahankan oleh para petani di Kabupaten Temanggung hingga saat ini. Mengutip dari Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI), Menurut Radjab (2013) terdapat tiga alasan utama tembakau terus dibudidayakan setiap tahunnya, yaitu: tembakau menjadi komoditas yang paling menguntungkan hingga saat ini; tidak semua lahan cocok dengan tanaman alternatif lain selain tembakau; tembakau dalam kelangsungannya bersentuhan dengan aspek budaya lokal di berbagai daerah. Dari penjelasan tersebut, wajar apabila tembakau terus diusahakan oleh para petani hingga berdampak pada berkembangnya varietas tembakau itu sendiri. Bahkan, di Kabupaten Temanggung terdapat berbagai varietas/jenis tembakau yang tumbuh dan diusahakan oleh para petani. Adapun banyaknya jenis tersebut disebabkan oleh adanya perbedaan topografi dan ciri khas tanah yang menjadikan hanya tembakau jenis tertentu yang dapat tumbuh. Misalnya, jenis tembakau yang ditanam di lereng Gunung Sumbing berbeda dengan jenis tembakau yang ditanam di Gunung Sindoro. Belum lagi perbedaan jenis tembakau yang ditanam di lereng Gunung Prau dan wilayah lain yang menjadikan jenis tembakau yang semakin bervariasi di setiap penjuru wilayah Kabupaten Temanggung. Selaras dengan hal

tersebut, Wisnu Brata (2012) dalam bukunya yang berjudul “*Tembakau atau Mati*” menjelaskan bahwa terdapat 8 jenis tembakau yang terdapat dalam rumpun Tembakau Temanggung antara lain: jenis *Lamuk*; jenis *Lamsi*; jenis *Twalo*; jenis *Paksi*; jenis *Swanbin*; jenis *Tionggang*; jenis *Swantingjan*; jenis sawah. Dari jenis-jenis tersebut, dua lokasi pertama yakni jenis *Lamuk* dan *Lamsi* memiliki mutu terbaik termasuk tembakau yang memiliki ciri khas dalam aspek mutu, rasa, dan aroma nya yang sangat melegenda yaitu tembakau srintil.

Srintil merupakan salah satu jenis tembakau paling terkenal yang dihasilkan oleh bumi pertanian Kabupaten Temanggung. Tembakau ini memiliki kadar nikotin yang tinggi sehingga menghasilkan rasa, tekstur, dan aroma khas yang menjadikan srintil sebagai tembakau dengan kualitas yang tinggi. Menurut hasil penelitian Balai Penelitian Tembakau dan Serat (dalam Khanifa, 2018) kadar nikotin yang terkandung di dalam tembakau srintil bervariasi antara 5 % hingga 8 %, bahkan untuk grade F, G, H, dan I tembakau srintil menghasilkan kadar nikotin yang lebih tinggi yaitu mencapai 20%. Tingginya kadar nikotin yang terkandung di dalamnya, menjadikan srintil sebagai tembakau yang paling diminati oleh industri rokok kretek dan memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi. Sebagai ilustrasi, pada tahun 2015 nilai jual tembakau srintil tembus diangka Rp1.250.000/kg (Khanifa, 2018). Adapun lereng Gunung Sumbing merupakan wilayah di Kabupaten Temanggung yang paling banyak menghasilkan srintil dengan kualitas terbaik dengan Desa Legoksari sebagai pusatnya (Runtiko dkk, 2018). Desa Legoksari merupakan salah satu desa yang terdapat di dalam wilayah Kecamatan Tlogomulyo, Kabupaten Temanggung. Berdasarkan lokasinya yang terletak di sisi timur lereng Gunung Sumbing, menjadikan Desa Legoksari sebagai wilayah yang menghasilkan tembakau jenis *Lamuk* dan *Lamsi* dengan kualitas srintil. Besarnya produksi tembakau srintil yang tumbuh di daerah ini menjadikan Desa Legoksari sebagai desa penghasil tembakau srintil yang kualitas unggul di Kabupaten Temanggung.

Sebagai daerah penghasil tembakau srintil yang memiliki nilai ekonomis tinggi dibanding dengan tembakau jenis lainnya, sudah seharusnya para petani di Desa Legoksari menerima kebermanfaatan dalam peningkatan ekonomi dan

kesejahteraannya. Akan tetapi, Berdasarkan observasi awal yang dilakukan oleh peneliti, pada kenyataannya justru petani tembakau di Desa Legoksari pada saat ini sebagian besar tidak mendapatkan kebermanfaatan dalam bentuk keuntungan yang melimpah dari hasil tembakau yang mereka hasilkan. Hal ini karena disebabkan oleh adanya berbagai faktor yang mempengaruhinya, termasuk adanya indikasi hubungan antar aktor di dalam pertanian tembakau srintil yang cenderung mengarah pada relasi yang eksploitatif. Argumen tersebut diperkuat dengan artikel ilmiah yang ditulis oleh Wibisono (2022) dengan judul “*Petani Tembakau Temanggung dalam Jerat Utang*” yang dipublikasikan di dalam media *Project Multatuli*. Di dalam artikel tersebut, dijelaskan bahwa terlepas dari adanya pengaruh cuaca yang menjadikan hasil tembakau tidak maksimal, kurangnya kebermanfaatan yang didapatkan oleh petani juga disebabkan oleh adanya ketidakadilan dalam tata niaga tembakau dan jerat utang “juragan” yang menjadikan tingkat kesejahteraan petani tembakau terus berkurang dari tahun ke tahun di wilayah Desa Legoksari.

Adanya fenomena tersebut tentunya menjadikan komoditas tembakau sebagai salah satu sub-sektor pertanian yang tak terlepas dari adanya sederet permasalahan yang terdapat di dalamnya. Adapun sederet permasalahan tersebut teraktualisasikan mulai dari persoalan modal hingga penjualan hasil tembakau. Dalam segi modal misalnya, para petani harus mengeluarkan modal yang tidak sedikit untuk membiayai proses penanaman tembakau mulai dari pengadaan bibit, tenaga kerja pembantu produksi, dan sarana penunjang lain seperti alat – alat pertanian. Selain itu, para petani juga dihadapkan oleh adanya pupuk bersubsidi yang sering kali mengalami kelangkaan dan harga obat-obatan pertanian atau pestisida yang semakin hari mengalami kenaikan. Sulitnya memperoleh pupuk bersubsidi, pestisida, dan sarana penunjang lainnya menjadi hambatan tersendiri bagi para petani yang mau tidak mau harus dihadapi dalam rangka melakukan produksi pertanian tembakau. Permasalahan keterbatasan petani dalam memperoleh modal menjadi hal yang sangat penting bagi kelangsungan usaha tani tembakaunya. Hal ini dipertegas oleh pendapat Alimusa & Ikhwan (2019:111) yang menyatakan bahwa modal merupakan bagian yang sangat penting dalam keberlangsungan

proses usaha pertanian, karena modal menjadi salah satu faktor penentu bagi pendapatan petani. Oleh karena itu, kemudahan petani dalam memperoleh akses modal pertanian dapat dikatakan sebagai sebuah kunci dalam berhasil atau tidaknya suatu produktivitas pertanian yang berdampak pada pendapatan petani itu sendiri.

Selanjutnya, para petani tembakau di Kabupaten Temanggung khususnya di Desa Legoksari juga dihadapkan oleh adanya permasalahan dalam penjualan hasil pertanian tembakau. Selama ini hasil pertanian tembakau di Kabupaten Temanggung diserap oleh berbagai industri atau perusahaan rokok terkemuka di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari adanya perwakilan gudang yang didirikan oleh beberapa perusahaan rokok tersebut di Kabupaten Temanggung dalam rangka sebagai tempat penampungan sebelum kemudian diangkut di pusat produksi atau pabrik masing-masing. Walaupun terdapat gudang perwakilan perusahaan rokok yang berdiri di daerah ini, tetapi dalam pelaksanaannya tidak menjadikan para petani tembakau dapat menjual hasil pertanian tembakau mereka secara langsung kepada perusahaan-perusahaan tersebut. Hal ini disebabkan oleh adanya pemberlakuan sistem Kartu Tanda Anggota (KTA) yang menjadikan hanya individu-individu yang memiliki identitas tersebut yang dapat menjual tembakau kepada perusahaan rokok di daerah ini. Sehingga, praktik tersebut melahirkan adanya individu dari kalangan pemegang KTA yang memiliki kedudukan penting dalam keberlangsungan mata rantai niaga tembakau di Kabupaten Temanggung. Mengutip dari Syaiful dkk (2019) kelangsungan petani dalam mengalami kesulitan untuk menjual hasil tembakaunya secara langsung ke gudang tembakau, berakibat pada petani yang harus menjual hasil tembakau melalui alur dagang atau bandol.

Keterbatasan modal dan akses pemasaran yang dihadapi petani tentunya menjadikan petani harus mencari “jalan alternatif” untuk dapat mempertahankan kelangsungan usaha tani tembakau mereka. Adapun hal yang mereka lakukan adalah dengan menjalin hubungan dengan pemilik KTA sekaligus sebagai pelepas modal. Bagi masyarakat Desa Legoksari, pelepas modal yang sekaligus menjadi pemilik KTA lebih familiar disebut sebagai “juragan”. Secara umum, pelepas modal atau “juragan” memiliki peran dalam memberikan pinjaman modal untuk

menunjang usaha pertanian petani dalam bentuk bibit dan pupuk (Romawati dkk, 2017). Selain itu, sebagai pemegang KTA juga menjadikan juragan sebagai pihak yang memiliki akses penjualan langsung kepada pabrikan. Dengan demikian, petani menganggap bahwa menjalin relasi dengan juragan akan dapat membantu baik bagi pemenuhan modal maupun penyediaan akses pemasaran tembakau yang mereka hasilkan.

Akan tetapi sama halnya dengan relasi utang piutang lainnya, relasi utang yang terjalin antara petani dan juragan juga tak terlepas dari persyaratan yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak. Adapun persyaratan tersebut diaktualisasikan dengan adanya pemberlakuan bunga terhadap pinjaman modal dan petani harus menjual hasil tembakaunya kepada juragan. Hal ini selaras dengan pendapat Kurdi (dalam Imaniar & Brata, 2020) yang menjelaskan bahwa adanya relasi utang dengan juragan mengakibatkan petani harus membayar bunga yang relatif lebih tinggi serta pengembalian modal dalam bentuk hasil pertanian sebagai konsekuensinya. Oleh karena itu, relasi utang yang terjadi di dalam pertanian tembakau dalam praktiknya secara tidak langsung menciptakan *bargaining position* yang tidak setara antara petani dan juragan. Hal ini karena adanya pemberian bantuan modal kepada petani tentunya memperkuat posisi tawar juragan dalam tata niaga tembakau. Selain itu, adanya praktik pemberlakuan bunga dan pembayaran hutang yang dilakukan petani dengan menjual hasil tembakaunya kepada juragan, memperlihatkan secara gamblang bahwa juragan menggunakan relasi utang untuk menjerat petani ke dalam lingkaran ketergantungan sosial.

Selama ini, interaksi petani dan juragan menjadi suatu fenomena yang mengakar di dalam kelangsungan pertanian tembakau srintil di Desa Legoksari. Hal ini tak terlepas dari kebutuhan modal dan keterbatasan akses pemasaran yang dihadapi oleh para petani. Besarnya modal yang dibutuhkan dalam membiayai produksi tembakau menjadikan sebagian besar petani tembakau di Desa Legoksari terjerat utang kepada juragan selama bertahun-tahun (Wibisono, 2022). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa relasi antara petani dan juragan yang bertahan dalam jangka waktu yang lama tak terlepas dari peran juragan dalam menciptakan

mekanisme ketergantungan bagi para petani tembakau di Desa Legoksari. Sehingga, adanya ketergantungan berkelanjutan telah menciptakan sebuah budaya di mana juragan dianggap sebagai satu-satunya sumber jaminan ekonomi bagi para petani. Oleh karena itu, Kondisi itu secara tidak langsung melahirkan adanya sebuah ketimpangan sosial yang terjadi antara petani dengan juragan. Adapun ketimpangan sosial tersebut teraktualisasikan dalam kedudukan petani sebagai pihak inferior yang berdampak pada rendahnya posisi tawar bagi petani itu sendiri. Rendahnya posisi tawar yang dimiliki petani berakibat pada adanya keterbatasan dalam pengambilan keputusan mandiri terkait keberlangsungan ekonominya. Dengan begitu, petani menjadi pihak yang paling rentan menjadi korban pemiskinan. Hal ini selaras dengan pendapat Sepherd (dalam Oluwatayo dan Ojo, 2016) yang menjelaskan bahwa lemahnya kaum miskin dalam pengambilan keputusan terkait ekonomi, politik, maupun budaya yang menyangkut hidup mereka, merupakan salah satu penyebab terjadinya kemiskinan.

Berdasarkan uraian di atas, Peneliti memahami bahwa terdapat permasalahan sosial-ekonomi di dalam kelangsungan pertanian tembakau srintil di Desa Legoksari. Berangkat dari permasalahan tersebut, Peneliti tertarik untuk memahami lebih dalam berkaitan dengan pola relasi antara juragan dan petani yang terjadi di Desa Legoksari sebagai daerah penghasil tembakau dengan kualitas terbaik di Kabupaten Temanggung. Selain itu, Peneliti juga berkeinginan untuk mengetahui dampak sosial yang disebabkan oleh terjadinya relasi antara juragan dan petani. Urgensi penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya penelitian tentang tembakau di Indonesia yang masih terfokus pada dimensi kebijakan, pola pertanian, dan budaya. Sementara, penelitian tentang relasi kekuasaan dalam pertanian tembakau masih sangat jarang dieksplorasi. Tidak hanya itu, kajian ini juga menjadi sangat penting dilakukan mengingat lingkaran kemiskinan yang dialami oleh petani tembakau akibat dari jerat utang juragan menjadi hal yang tidak boleh terjadi secara berlarut-larut. Namun demikian, studi ini tidak hanya berkutat pada aspek sosial dan ekonomi semata, tetapi juga menunjukkan bagaimana kekuasaan dijalankan di tingkat lokal.

Dalam konteks penelitian ini, relasi antara petani dan juragan dipahami sebagai bagian dari praktik kekuasaan informal yang turut serta dalam membentuk struktur kekuasaan lokal. Adapun posisi juragan sebagai aktor dominan bukan hanya dilihat dari sisi ekonomi, tetapi juga sebagai kekuatan politik yang memiliki pengaruh dalam pengambilan keputusan yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa praktik pemerintahan tidak selalu dilakukan oleh lembaga formal, tetapi juga bisa muncul dari relasi-relasi kekuasaan yang tumbuh dari bawah. Sebagaimana pendapat Migdal (2001) yang menjelaskan bahwa dalam masyarakat agraris, institusi-institusi informal sering kali mengambil alih fungsi negara. Maka dari itu, penelitian ini relevan dengan kajian Politik dan Ilmu Pemerintahan karena berusaha membedah bagaimana pola aktor non-negara saling mengisi kekosongan peran pemerintah serta menjalankan fungsi yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah dalam sektor pertanian. Dengan begitu, penelitian ini turut berkontribusi dalam memperluas pemahaman mengenai bagaimana kekuasaan dijalankan, dipertahankan, dan dinegosiasikan di luar kerangka negara formal yang selama ini menjadi fenomena politik laten di banyak desa di Indonesia.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pola relasi antara Juragan dan Petani dalam pertanian tembakau srintil yang terjadi di Desa Legoksari Kabupaten Temanggung?
2. Apa dampak sosial dari adanya relasi antara Juragan dan Petani dalam pertanian tembakau srintil yang terjadi di Desa Legoksari Kabupaten Temanggung?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Memahami dan mendeskripsikan bagaimana pola relasi antara Juragan dan Petani dalam pertanian tembakau srintil yang terjadi di Desa Legoksari Kabupaten Temanggung.
2. Memahami dan mendeskripsikan apa dampak sosial dari adanya relasi antara Juragan dan Petani dalam pertanian tembakau srintil yang terjadi di Desa Legoksari Kabupaten Temanggung.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat dari adanya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.4.1. Secara Teoritis

Manfaat penelitian ini secara teoritis adalah untuk menambah wawasan dan pemahaman berkaitan dengan relasi yang terjadi antara juragan dan petani tembakau di Desa Legoksari Kabupaten Temanggung. Kemudian, Penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber referensi atau rujukan bagi penelitian lain yang memiliki fokus yang sama berkaitan dengan relasi patron-klien. Selanjutnya, Hasil penelitian ini dimaksudkan untuk dapat berkontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan mengenai dinamika pertembakauan yang terjadi di Indonesia.

1.4.2. Secara Praktis

Manfaat penelitian ini secara praktis adalah untuk memberikan gambaran kepada pemerintah, akademisi, maupun masyarakat umum untuk lebih memahami dinamika dan permasalahan pertembakauan di Indonesia serta dapat menghadirkan sebuah solusi dalam mengatasi permasalahan tersebut untuk mewujudkan kesejahteraan sosial. Kemudian, dengan melakukan penelitian ini secara tidak langsung Peneliti diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan analisis berpikir yang tajam. Selanjutnya, Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan pemerintah,

akademisi, dan masyarakat akan relasi yang terjadi antara Juragan dan Petani dalam pertanian tembakau srintil di Desa Legoksari Kabupaten Temanggung.

1.5. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelusuran penulis, setidaknya terdapat beberapa penelitian terdahulu yang membahas mengenai dinamika patron-klien di masyarakat dan fokus yang relevan dengan topik penelitian ini. *Pertama*, Karya ilmiah yang ditulis oleh Arofah dan A. Hendra Setiawan (2021) yang dipublikasikan di dalam jurnal *Business Economic Entrepreneurship* dengan judul “Analisis Determinan Penawaran Tembakau (Studi Kasus: Fenomena Patron-Klien Antara Petani Tembakau dan Tengkulak di Desa Katekan, Kecamatan Ngadirejo, Temanggung)”. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan observasi dan *indepth interview* dengan kuesioner untuk mengetahui fenomena patron-klien terhadap interaksi petani tembakau dengan tengkulak dalam hal penawaran, hutang, dan kepercayaan. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa adanya relasi utang-piutang menyebabkan adanya pola patron-klien antara petani tembakau dan tengkulak sehingga dapat mempengaruhi penawaran harga tembakau di Desa Katekan, Kecamatan Ngadirejo, Temanggung. Penelitian yang terfokus pada pengaruh variable-variabel tertentu menjadikan studi ini mengalami kekurangan dalam mengkaji lebih dalam mengenai latar belakang terjadinya patronase antara tengkulak dan petani. Selain itu, di dalam studi ini tidak menjelaskan lebih lanjut berkaitan dengan proses interaksi sosial yang terjadi antara tengkulak dan petani tembakau sebagai pihak yang terlibat di dalam sistem patron-klien yang terjadi di Desa Katekan, Kecamatan Ngadirejo, Temanggung.

Kedua, meskipun secara eksplisit tak menyebut kata “patron-klien” atau “patronase”, Studi ilmiah yang berjudul “Kesetiaan Palsu: Eksploitasi Petani Tembakau Temanggung” oleh A. Brilian Dewanta (2022) juga termasuk di dalam penelitian terdahulu yang relevan bagi penelitian ini. Karya ilmiah yang diterbitkan oleh jurnal Lembaran Antropologi ini menggunakan kualitatif sebagai basis metodologinya. Di dalam penelitian ini ditemukan bahwa nilai tembakau yang

dihasilkan oleh petani menjadi rendah yang disebabkan oleh adanya ikatan hutang di dalam rantai produksi tembakau yang eksploitatif. Selain itu, adanya aktor-aktor seperti perajin, calo, tengkulak, juragan, dan grader yang menggunakan mekanismenya masing-masing, turut menjadi perampas bagi nilai tembakau yang dihasilkan oleh petani tembakau di Desa Tegalrejo, Kecamatan Bulu, Kabupaten Temanggung.

Ketiga, Artikel Fuad, Aenurofik, dan Ahmad Rosyid berjudul “Belenggu Tengkulak Atas Petani Pembudidaya Lele: Relasi Patron-Klien Budidaya Lele Di Wonotunggal Jawa Tengah” yang dipublikasikan pada Jurnal Hukum Islam (JHI), Desember 2015. Dalam tujuannya, studi ini berupaya untuk menguak terjadinya relasi patron-klien serta mengukur seberapa kuat jeratan tengkulak kepada petani pembudidaya lele. Sehingga dalam penelitian tersebut ditemukan bahwa adanya keterikatan tengkulak dan petani dipicu oleh keterbatasan modal yang dimiliki oleh petani untuk memenuhi kebutuhan produksinya. Selain itu, di dalam proses utang-piutang yang terjadi antara tengkulak dan petani secara umum tidak terdapat perjanjian tertulisnya. Sehingga dalam hal ini bisa saja lemahnya perjanjian di mata hukum membuat petani untuk menyangkal dari jeratan hutang tengkulak tersebut. Akan tetapi, adanya legitimasi sosial dan kultural memaksa petani (klien) untuk harus dapat patuh kepada tengkulak (patron).

Keempat, Artikel M. Nurjihadi dan A. Hadi Dharmawan (2016) berjudul “Lingkaran Setan Kemiskinan Dalam Masyarakat Pedesaan Studi Kasus Petani Tembakau Di Kawasan Pedesaan Pulau Lombok” yang dipublikasikan oleh Scientific Journals of Bogor Agricultural University. Studi ini mencoba menjelaskan mengenai lingkaran kemiskinan yang muncul di pedesaan Pulau Lombok akibat adanya hubungan kemitraan antara Perusahaan dan petani tembakau. Dalam temuannya, penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan taraf hidup akibat dari berkembangnya usahatani menyebabkan adanya ketergantungan dikalangan petani terhadap komoditas tembakau dan perusahaan mitranya. Pola ketergantungan terbentuk dari adanya bantuan dari perusahaan mitra berupa pemberian bantuan kredit sarana produksi dan pembayaran tersebut harus melalui

penjualan produk yang dihasilkan petani kepada perusahaan mitra. Sehingga dengan adanya pola seperti itu, menjadikan perusahaan mitra memiliki power untuk mengatur harga produk yang dihasilkan petani tembakau. Kondisi itu tentunya memberikan dampak pada rendahnya tingkat pendapatan petani yang berakibat pada jerat utang yang menjebak petani tembakau. Oleh karena itu, rendahnya pendapatan yang diperoleh serta penumpukan hutang dan lemahnya akumulasi modal oleh petani akibat jebakan utang yang menjerat menjadikan adanya lingkaran setan kemiskinan yang sempurna yang terjadi di kalangan masyarakat pedesaan di Pulau Lombok.

Kelima, Artikel ilmiah yang ditulis oleh Imaniar dan N. Trisnu Brata (2020) yang dipublikasikan oleh jurnal SOLIDARITY dengan judul “Relasi Patron-Klien di Antara Tengkulak dan Petani Salak dengan Dampak Sosialnya di Banjarnegara”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan fokus relasi patron-klien yang terjadi antara petani salak dan tengkulak di Desa Sigaluh serta dampak sosial yang terjadi di dalam relasi tersebut. Di dalam penelitian ini, ditemukan bahwa terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab adanya relasi patron-klien antara petani salak dan tengkulak. Adapun faktor-faktor tersebut antara lain ekonomi, kebiasaan, sosial, dan permainan harga. Kemudian, dampak sosial dari relasi patron-klien yang terjalin antara petani salak dan tengkulak dapat dilihat dari adanya rasa saling menghormati serta tidak membedakan pekerjaan antara tengkulak, petani salak, serta masyarakat lain. Selain itu, tengkulak juga memberikan bantuan sosial berupa modal atau jasa apabila Masyarakat atau petani salak meminta bantuan kepadanya.

Keenam, Artikel ilmiah yang ditulis oleh Eva Hardian dkk (2024) yang dipublikasikan oleh JIPPM (Jurnal Ilmiah Penyuluhan dan Pengembangan Masyarakat) dengan judul “Ketergantungan Petani Sayuran Terhadap Tengkulak Sebagai Patron-Klien Dalam Kegiatan Pertanian (Studi Kasus Desa Wakuli Kecamatan Kapuntori Kabupaten Buton)”. Studi ini menggunakan kualitatif sebagai basis metodologinya dan memiliki fokus dalam menjelaskan relasi patron-klien antara petani sayur dan tengkulak. Di dalam analisisnya, penelitian ini

menunjukkan bahwa tengkulak dan petani memiliki peran masing-masing dalam relasi patron-klien yang terjadi. Tengkulak memiliki peran sebagai pemberi modal, pembeli, dan pemasar. Sedangkan petani sebagai penerima modal dan pihak yang memproduksi sayuran serta menjualnya kepada tengkulak. Dari adanya perbedaan peran dapat dilihat bahwa patron-klien yang terjadi disebabkan oleh adanya hubungan ketergantungan petani sayuran kepada tengkulak. Hal ini dapat dibuktikan dengan hasil wawancara seluruh informan dalam penelitian tersebut yang menyatakan bahwa rata-rata hasil panen sayuran petani disalurkan kepada tengkulak.

Ketujuh, Meskipun memiliki fokus penelitian yang berbeda karena menggunakan perspektif “gerakan sosial” sebagai basis pemikirannya, tetapi karya tulis ilmiah berjudul “Memutus Patron-Klien di Lingkungan Perkebunan” yang ditulis oleh H. T. Ardianto dan L. Ni’am (2009) juga termasuk di dalam daftar penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini. Artikel yang dipublikasikan oleh jurnal Politics and Government ini menggunakan pendekatan studi kasus dan kualitatif sebagai basis metodologinya. Di dalam analisisnya, Artikel ini menjelaskan bahwa terdapat interaksi patron-klien laten yang terjadi di lingkungan perkebunan tembakau vorstenlanden Klaten. Relasi patron-klien tersebut teraktualisasikan dengan adanya hubungan antara petani tembakau vorstenlanden (klien) dan PT Perkebunan Nusantara X/PTPN X (patron). Hubungan patron-klien yang terjadi di lingkungan perkebunan tembakau vorstenlanden sejatinya sudah terjalin sejak lama, termasuk saat jaringan VOC masih bercokol di Indonesia. Lamanya relasi patron-klien yang terjalin berdampak pada pemberlakuan mekanisme perusahaan antara petani dan perusahaan yang berbeda pada tiap periode pemerintahan. Berangkat dari ketidakberdayaan dan ketidakseimbangan bargaining position petani terhadap perusahaan memicu adanya gerakan sosial petani yang dimotori kelompok intelektual yang tergabung di dalam Forum Petani Tembakau Vorstenlanden (FPTV). Sehingga dalam penelitian ini ditemukan bahwa gerakan sosial tersebut mampu memutus patron-klien yang berdampak pada seimbangannya kedudukan petani dan perusahaan. Bahkan seimbangannya kedudukan tersebut memberikan dampak positif pada terealisasinya program Corporate

Responsibility (CSR) oleh PTPN X bagi masyarakat Klaten yang merupakan wilayah kerja PTPN X Unit Tembakau.

1.6. Landasan Teori

1.6.1. Teori Relasi Patron-Klien

Secara etimologis, Istilah “patron” dan “klien” berasal dari Bahasa Spanyol, patron memiliki arti sebagai seseorang yang memiliki kekuasaan, status, wewenang, dan pengaruh. Sedangkan klien berarti bawahan atau orang yang diperintah dan yang disuruh (Ravanza, 2023). Pola hubungan yang terbentuk di dalam relasi patron-klien disebabkan oleh adanya hubungan dari dua individu atau kelompok yang memiliki kedudukan tidak sejajar dan bersifat continue. Ketidaksetaraan hubungan yang terjalin di dalam relasi ini teraktualisasikan dengan patron yang memiliki kedudukan lebih tinggi (superior) dibanding klien yang memiliki kedudukan lebih rendah (inferior). Menurut James Scott, Patron-klien merupakan hubungan timbal balik yang terjadi di antara dua orang (yang memiliki perbedaan status ekonomi) yang terjalin secara khusus dengan dasar saling menguntungkan, serta saling memberi dan menerima, Dimana status sosial yang lebih tinggi (patron) dengan sumber daya yang dimiliki memberikan perlindungan serta keuntungan kepada orang dengan status sosial yang lebih rendah (Rokhmah & Handoyo, 2015).

Menurut James Scott (1972) setidaknya terdapat tiga karakter yang melatarbelakangi adanya hubungan patron-klien antara lain;

- 1) Adanya ketidakseimbangan atau ketidaksetaraan antara patron dan klien. Patron yang memiliki status sosial yang lebih tinggi dibandingkan dengan klien. Ketidakmampuan pertukaran yang dilakukan klien kepada patron dalam bentuk materi, menjadikan klien memiliki kewajiban untuk memberikan jasa dalam bentuk tenaga dan pengabdian kepada patron;
- 2) Terdapat sifat face-to-face atau tatap muka dalam hubungan patron-klien. Dalam rangka membangun relasi, patron tidak sembarangan dalam menentukan orang yang akan dijadikan sebagai partner pekerjaan atau klien. Dengan memilih orang yang sudah dikenal, dijadikan strategi bagi patron

untuk meringankan pekerjaannya dalam relasi patron-klien yang terbentuk. Selain itu, hubungan timbal balik yang terjalin memunculkan adanya jaminan sosial yang memberikan rasa nyaman pada para pihak yang terlibat.

- 3) Terbangunnya sifat luwes dan terus berkelanjutan. Ikatan yang terjalin dalam relasi patron-klien menjadi unsur yang berperan kemudahan bagi pihak yang terlibat seperti kemudahan akses dalam memperoleh sumber daya sosial dan ekonomi. Kontribusi hubungan patron-klien bagi kelangsungan hidup menjadikan jalinan ini tersebut bertahan dan berlanjut.

Sementara itu, Menurut Koentjaraningrat (dalam Ardianto dan Ni'am, 2009) mengistilahkan interaksi patron-klien sebagai interaksi hubungan induk semang-klien. Induk-semang dapat diartikan sebagai pihak yang berkuasa dan harus memberikan perlindungan semaksimal mungkin kepada kliennya. Di sisi lain, kliennya harus membalas budi kepada induk-semangnya serat melakukan pembelaan dan pengabdian. Sehingga dalam konteks ini, secara gamblang menjelaskan bahwa relasi yang terjalin menempatkan klien berada dibawah dominasi induk-semang melalui bayang-bayang "utang". Oleh karena itu, Kondisi tersebut menjadikan klien terus mengalami ketergantungan kepada induk-semang.

Seperti yang diketahui, Scott (1972) di dalam penelitiannya yang berjudul "Patron-Client Politics and Political Change in Southeast Asia" menjelaskan bahwa hubungan patron-klien merupakan relasi yang dibangun atas ketergantungan satu sama lain. Kuatnya hubungan yang terjalin antara patron dan klien menjelma menjadi norma yang berisikan hak dan kewajiban yang melekat serta dimiliki oleh patron dan klien itu sendiri. Timbal balik berupa pemberian jaminan perlindungan dan keamanan yang terjadi di dalam relasi patron-klien menjadikan norma yang terbentuk akan tetap dipertahankan. Selanjutnya, Scott juga menjelaskan bahwa terdapat ciri-ciri relasi patron-klien yang memuat tiga hal. Pertama, Hubungan personal yang bersifat langsung dan intensif. Kedua, Hubungan loyalitas dalam bentuk loyalitas dan kepatuhan. Ketiga, Hubungan timbal balik yang saling menguntungkan.

Selanjutnya, masih dalam kerangka teoritis patron-klien oleh James Scott, terdapat dua kategori di dalam praktik relasi patron-klien yakni kategori kluster dan kategori piramida. Di dalam kategori kluster, patron memiliki kedudukan sebagai pusat yang berisikan sejumlah klien. Dengan begitu, dalam kategori ini patron memiliki posisi di atas klien. Di sisi lain dalam kategori piramida, patron memiliki kedudukan sebagai pusat yang di bawahnya diikuti secara langsung oleh sejumlah klien yang turut menjadi “patron” dengan “klien” nya masing-masing (Putri dkk, 2021). Walaupun dalam hal ini terdapat fenomena klien menjelma menjadi patron dan memiliki kliennya masing-masing, menurut Scott (1972) klien yang menjelma menjadi patron tersebut akan tetap pada setia patronnya dan memperlakukan kliennya sesuai dengan apa yang menjadi kehendak patronnya tersebut.

1.6.2. Teori Ketimpangan Sosial

Ketimpangan sosial dapat diartikan sebagai kondisi dimana terdapat perbedaan distribusi sumber daya, status, kesempatan, dan kekuasaan antara individu atau kelompok di suatu masyarakat. Menurut Marx (1848), Terjadinya ketimpangan sosial dipicu oleh adanya struktur ekonomi yang memusatkan kekuasaan dan kekayaan pada sekelompok kecil orang, sementara mayoritas lainnya bekerja dalam kondisi yang tidak menguntungkan. Ketimpangan sosial tidak hanya sekedar menunjukkan perbedaan, tetapi juga mencakup relasi kuasa setara termasuk tidak meratanya akses terhadap sumber daya material maupun nonmaterial (Kerbo, 2012). Max Weber (1978) setidaknya memperkenalkan tiga dimensi utama ketimpangan: status sosial, kelas ekonomi, dan kekuasaan politik yang keberadaannya memperburuk ketimpangan yang ada. Sehingga, dapat dipahami bahwa dalam pengertian yang lebih luas, ketimpangan sosial disebabkan oleh adanya perbedaan sistematis dalam hal kontrol dan akses terhadap sumber daya berharga yang berakibat pada terciptanya hierarki sosial dalam masyarakat.

Menurut Grusky (1994), terdapat beberapa dimensi yang saling terkait di dalam ketimpangan sosial, antara lain:

- 1) Dimensi Sosial: Berkaitan dengan perbedaan status yang dimiliki individu/kelompok.
- 2) Dimensi Ekonomi: Berkaitan dengan perbedaan distribusi pendapatan dan control atas alat-alat produksi.
- 3) Dimensi Politik: Berkaitan dengan perbedaan distribusi kekuasaan dalam mempengaruhi pengambilan Keputusan.
- 4) Dimensi Budaya: Berkaitan dengan perbedaan akses terhadap informasi, Pendidikan, dan ekspresi identitas budaya.

Ketimpangan sosial sebagai permasalahan yang eksis di masyarakat memiliki kecenderungan untuk bertahan bahkan berkelanjutan melalui berbagai mekanisme yang terjadi. Menurut Tilly di dalam bukunya yang berjudul “*Durable Inequality*” (1998), menjelaskan bahwa munculnya ketimpangan sosial tidak terjadi secara kebetulan, tetapi dibangun dan dipertahankan melalui mekanisme ketergantungan struktural. Di dalam pengertiannya, ketergantungan struktural dapat dipahami sebagai sebuah sistem yang di dalamnya terdapat perbedaan kategori sosial (kelas) yang digunakan untuk menciptakan dan meleluaskan akses yang tak setara terhadap sumber daya. Kemudian, Ketimpangan yang terjadi di masyarakat bukan fenomena individual, melainkan merupakan hasil dari adanya relasi sosial dan organisasi yang terdapat di dalamnya. Selain itu, Tilly juga menekankan bahwa terdapat mekanisme utama yang menjadi penyebab berkelanjutannya suatu ketimpangan sosial, yaitu *replication* (penyalinan/pengulangan), *adaptation* (adaptasi), *eksploitation* (eksploitasi), dan *opportunism* (peluang).

Jika Charles Tilly berpendapat bahwa ketimpangan sosial yang terus berlanjut dipengaruhi oleh ketergantungan struktural, maka Gramsci memiliki pemikiran lain berkaitan dengan mengapa ketimpangan sosial dapat terus berlanjut. Di dalam perspektif Gramsci (1971) ketimpangan sosial yang mengalami keberlanjutan disebabkan oleh adanya normalisasi dan legitimasi, di

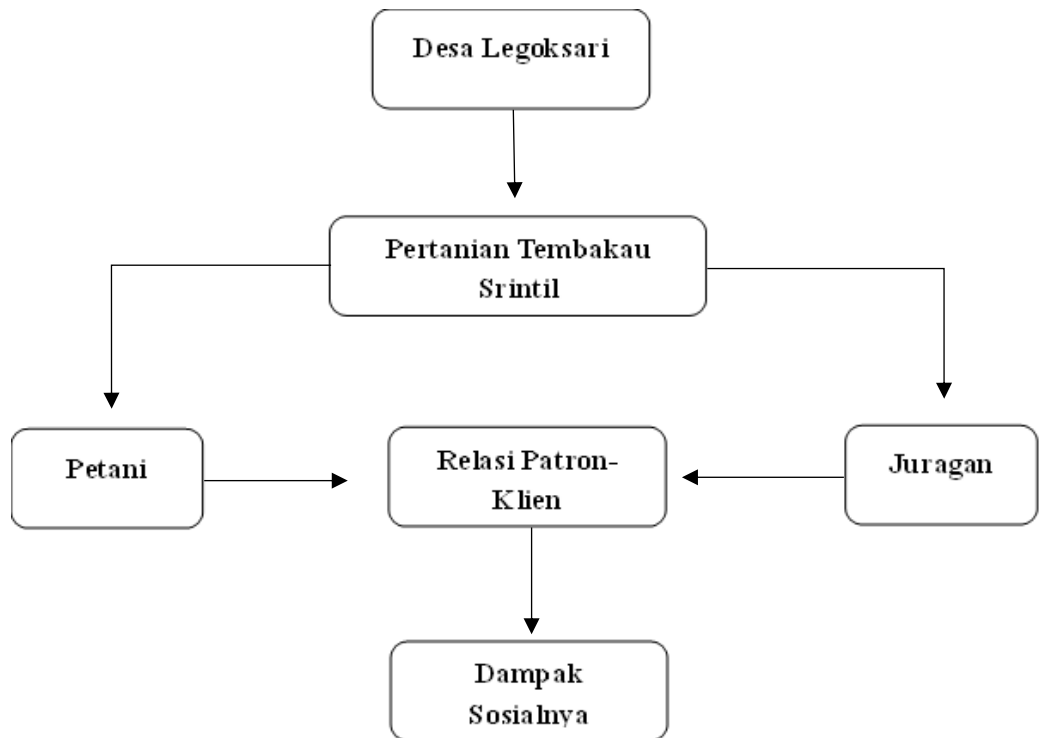
mana relasi kekuasaan yang tak setara dianggap wajar dan alamiah bahkan menguntungkan bagi pihak yang kurang beruntung (subordinat). Ketimpangan sosial yang dianggap alami dan wajar tersebut disebabkan oleh adanya pihak/kelompok dominan dalam mempertahankan kekuasaan melalui kontrol budaya dan ideologis. Sehingga kondisi tersebut berakibat pada penerimaan nilai-nilai, norma, dan keyakinan kelompok dominan oleh kelompok subordinat. Oleh karena itu, dalam pemikirannya untuk mengatasi ketimpangan sosial, Bagi Gramsci perlu adanya sebuah perubahan tak hanya dalam aspek ekonomi. Tetapi juga membutuhkan perubahan budaya dan ideologis untuk menumbuhkan kesadaran kritis bagi kalangan “kurang beruntung” untuk menentang hegemoni kelompok dominan.

Dengan menggunakan basis pemikiran teoritis tentang ketimpangan sosial, penelitian ini nantinya akan berisikan analisis mengenai relasi patron-klien dalam pertanian tembakau srintil di Desa Legoksari yang tak hanya melahirkan ketimpangan ekonomi, tetapi juga identitas sosial, relasi kekuasaan, dan struktur sosial yang terdapat di dalamnya.

1.7. Kerangka Berpikir

Menurut Sugiyono (2013) Kerangka pemikiran merupakan alur berpikir atau alur penelitian yang dijadikan sebagai pola landasan berpikir peneliti dalam mengadakan penelitian terhadap objek yang dituju. Dengan begitu, kerangka pikir berfungsi untuk menjelaskan bagaimana variable-variabel yang terdapat di dalam penelitian saling terkait sehingga dapat memengaruhi fenomena yang diteliti. Adapun kerangka pikir dalam penelitian ini sebagai berikut:

Gambar 1. Kerangka Berpikir



Sumber: Diolah Peneliti Tahun 2024

1.8. Operasionalisasi Konsep

Pada dasarnya, operasionalisasi konsep merupakan salah satu unsur di dalam penelitian yang berfungsi sebagai pembingkai berupa batasan-batasan tertentu dengan menggunakan variable pengukuran. Menurut Sugiyono (2013) operasionalisasi konsep adalah suatu langkah yang digunakan oleh peneliti untuk mengukur variable di dalam penelitian. Operasionalisasi konsep juga memiliki tujuan untuk mempermudah peneliti dalam melakukan penelitian. Adapun dimensi-dimensi di dalam penelitian ini sebagai berikut:

Tabel 1. Operasionalisasi Konsep

Konsep	Definisi	Dimensi	Indikator
Relasi Patron-Klien	Patron-klien merupakan hubungan timbal balik yang terjadi diantara dua orang yang terjalin secara khusus dengan dasar saling menguntungkan, serta saling memberi dan menerima, Dimana status sosial yang lebih tinggi (patron) dengan sumber daya yang dimiliki memberikan perlindungan serta keuntungan kepada orang dengan status sosial yang lebih rendah (Scott, 1972).	Juragan (Patron)	1.1 Memiliki sumber daya seperti uang, pekerjaan, perlindungan, dan modal. 1.2 Memiliki pengaruh yang dominan dalam menentukan keputusan. 1.3 Memiliki jaringan yang terdiri dari sejumlah individu yang memiliki ketergantungan (klien) pada mereka. 1.4 Memiliki jalinan/hubungan yang erat dan berkelanjutan dengan sejumlah individu yang memiliki ketergantungan (klien) dengannya. 1.5 Memiliki kecenderungan untuk menjaga stabilitas dan kesetiaan individu yang terikat (klien) dengannya. 1.6 Memiliki taktik manipulasi untuk mengatur/menentukan perilaku individu yang terikat (klien) sesuai dengan keinginannya. 1.7 Memiliki ambisi untuk mempertahankan posisi mereka di dalam hierarki sosial
		Petani (Klien)	2.1 Tidak memiliki alternatif sumber daya untuk melakukan kegiatan produksi pertanian. 2.2 Membutuhkan dukungan ekonomi berupa modal dan penjualan hasil pertanian. 2.3 Memiliki jalinan/hubungan dengan individu yang memberikan modal dan akses (patron). 2.4 Memiliki pengaruh yang kurang dominan dalam menentukan keputusan. 2.5 Keputusan yang diambil ditentukan oleh arahan dari pemberi modal (patron).

			2.6 Membutuhkan individu untuk mendapatkan perlindungan dan bantuan. 2.7 Memiliki kewajiban untuk mengembalikan/memberikan imbalan kepada individu yang memberikan modal dan akses (patron).
Ketimpangan Sosial	Ketimpangan sosial merupakan fenomena ketidaksetaraan yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat yang disebabkan oleh 3 dimensi, yaitu: kelas, status dan kekuasaan (Weber, 1949).	Kelas	3.1 Kepemilikan akses terhadap modal ekonomi 3.2 Kepemilikan posisi dalam struktur produksi. 3.3 Penghasilan yang dimiliki 3.4 Kemampuan mobilitas ekonomi
		Status	4.1 Memiliki pengakuan kehormatan. 4.2 Penerimaan sosial dalam struktur masyarakat
		Kekuasaan	5.1 Memiliki kemampuan membuat keputusan kolektif 5.2 Memiliki jaringan sosial. 5.3 Memiliki kemampuan untuk melakukan sanksi 5.4 Memiliki kemampuan untuk mengarahkan tindakan orang lain.

1.9. Metode Penelitian

1.9.1. Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan etnografi. Menurut Creswell (2014) Penelitian kualitatif merupakan salah satu unsur di dalam penelitian yang berisikan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami “makna” yang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan oleh sejumlah individu atau kelompok. Metode kualitatif dalam konteks penelitian ini mempunyai keunggulan jika dibandingkan dengan metode kuantitatif, karena dengan menggunakan metode kualitatif maka pembahasan yang disajikan akan bersifat komprehensif, detail,

dan inklusif. Selain itu, metode kualitatif ini juga bisa digunakan untuk menganalisa fenomena permasalahan yang terdapat di dalam penelitian ini. Kemudian, pendekatan etnografi di dalam penelitian ini dimaksudkan peneliti untuk dapat mampu melakukan penggalian data termasuk menangkap makna, struktur relasi sosial, serta praktik-praktik kekuasaan informal yang tak selalu tampak secara eksplisit dalam kehidupan sehari-hari yang ada di lapangan. Selama proses penelitian, pendekatan ini terbukti efektif dalam menggali narasi, pengalaman, dan pemaknaan yang dibentuk oleh para subjek dalam penelitian ini.

1.9.2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Desa Legoksari, Kecamatan Tlogomulyo, Kabupaten Temanggung. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada karakteristik sosial-ekonomi masyarakat desa yang mayoritas bekerja sebagai petani tembakau. Selain itu, Desa ini juga dikenal sebagai salah satu pusat penghasil tembakau srintil, sehingga dinilai relevan untuk menjadi lokasi penelitian. Penelitian lapangan dilakukan bertahap selama 4 bulan, yakni dari bulan Januari hingga Mei Tahun 2025.

1.9.3. Informan Penelitian

Informan dalam penelitian terdiri dari Petani, Juragan, Kepala Desa, dan pihak-pihak terkait dalam pertanian tembakau srintil di Desa Legoksari. Penentuan informan dilakukan secara *purposive*, yakni dengan mempertimbangkan keterlibatan langsung mereka dalam praktik patron-klien yang menjadi topik utama dalam penelitian ini. Sebanyak 11 informan dipilih berdasarkan kapasitasnya untuk memberikan informasi yang mendalam dan bervariasi. Adapun proses wawancara dilakukan secara fleksibel, baik melalui pertemuan formal maupun percakapan informal yang dilakukan di lokasi pertanian, rumah, dan Balai Desa.

1.9.4. Sumber Data Penelitian

Dengan menggunakan pendekatan etnografi, maka data yang diperoleh berupa uraian yang tidak terstruktur sehingga perlu adanya analisis dengan melakukan interpretasi makna yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan deskripsi/penjelasan. Dalam penelitian ini, sumber data berupa data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan dari masyarakat yang terlibat di dalam fenomena atau permasalahan penelitian. Adapun data sekunder diperoleh dari studi Pustaka dan pengumpulan dokumen-dokumen serta arsip yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

1.9.5. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2013) Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dalam penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa melalui Teknik pengumpulan data, maka penelitian tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Adapun penelitian ini teknik pengumpulan data yang dilakukan sebagai berikut:

1) Wawancara

Pada wawancara ini, peneliti dapat melakukan *face-to-face interview* (wawancara berhadap-hadapan) dengan informan utama yaitu petani, juragan, dan kepala desa. Dalam melakukan wawancara, tentu saja memerlukan pertanyaan-pertanyaan baik terstruktur yaitu dengan menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang tersusun secara sistematis. Selain itu, peneliti juga menggunakan cara semi terstruktur yaitu dengan mendengarkan secara teliti dan mencatat informasi yang dikemukakan oleh informan. Kemudian, peneliti juga dapat menggunakan cara tak terstruktur yaitu dengan melakukan wawancara dengan bebas, di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap. Beberapa wawancara dilakukan lebih dari satu kali untuk menggali kedalaman informasi.

2) Observasi

Observasi partisipatif dilakukan dengan mengikuti aktivitas petani dan juragan, terutama selama masa tanaman dan perawatan, karena selama masa penelitian ini belum memasuki masa panen. Akan tetapi, peneliti merupakan putra asli daerah yang telah mengetahui dinamika tata niaga tembakau. Dengan begitu, peneliti melakukan pencatatan interaksi, praktik-praktik sosial, serta simbol-simbol budaya yang muncul dalam aktivitas pertanian dan tata niaga.

3) Studi Pustaka

Teknik pengumpulan data semacam ini termasuk ke dalam jenis data sekunder sebagai pendukung data primer. Teknik pengumpulan data studi pustaka dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menganalisa karya ilmiah yang berkaitan dengan fenomena di dalam fokus penelitian ini. Dengan metode pengumpulan data ini, peneliti dapat memperoleh informasi dan sumber tertulis yang ada pada informan maupun institusi terkait dengan fenomena yang menjadi fokus di dalam penelitian ini.

1.9.6. Analisa dan Interpretasi Data

Dalam dunia akademik khususnya berkaitan dengan metodologi penelitian, analisis data dalam penelitian terdiri dari beberapa tahapan. Dengan menggunakan model analisis data yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman (1994), *pertama*, yang mesti dilakukan oleh peneliti adalah melakukan reduksi data (*data reduction*). Reduksi data secara umum dapat dipahami sebagai “*hermeneutic*” yaitu berupa proses seleksi yang terfokus pada penyederhanaan bentuk data yang diperoleh menjadi satu bentuk tulisan yang dianalisis. Reduksi data juga memiliki arti sebagai upaya untuk memangkas data sehingga yang terpilih adalah data yang penting serta

memiliki relevansi dengan penelitian yang diangkat. *Kedua*, penyajian data (*data display*). Penyajian data merupakan salah satu bagian dalam analisis data yang memiliki fokus di mana peneliti harus mengolah data yang telah direduksi dan menyesuaikannya sebagaimana konsep penelitian yang dicanangkan. Di sisi lain, pada bagian ini peneliti juga harus membuka peluang untuk menarik Kesimpulan yang relevan dengan arah penelitian. *Ketiga*, penarikan Kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dapat dimaknai sebagai upaya penyederhanaan data sehingga lebih mudah dipahami oleh pembaca. Kesimpulan dalam penelitian harus bersifat *holistic* atau mampu untuk menggambarkan seluruh data yang ada dengan kalimat sederhana dan mudah dipahami. Kesimpulan yang telah didapatkan harus diverifikasi kebenarannya sehingga tidak menghasilkan kerancuan penelitian. Oleh karena itu, peneliti harus melakukan triangulasi yaitu kebenaran sebuah simpulan yang sudah ditarik menggunakan sudut pandang yang lain pada penelitian tersebut. Adapun triangulasi kesimpulan ini memiliki tujuan supaya penelitian yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan kredibilitasnya.

1.9.7. Kualitas Data

Dalam penelitian ini, Peneliti menggunakan dua Teknik pengambilan data yang berbeda dengan tujuan untuk memperoleh perbandingan data atas yang disampaikan oleh narasumber saat wawancara dengan fakta yang terjadi di lapangan. Di sisi lain, Analisa data yang dilakukan juga memiliki tujuan untuk meminimalisir adanya potensi data yang tidak sesuai dengan kondisi di lapangan maupun tujuan penelitian. Tak cukup sampai di situ, peneliti juga akan membandingkan dengan penelitian lain yang memiliki kesamaan topik sehingga nantinya data yang diinterpretasikan tidak memiliki kerancuan. Terakhir, peneliti juga menggunakan triangulasi data, yakni dengan cara melakukan validasi data yang digunakan obyektif atau justru bertentangan satu sama lain menggunakan sudut pandang yang lain terhadap data yang ada.